

**PERANAN KEPALA KAMPUNG UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM BERPOLITIK DI KAMPUNG MAMORIBO DISTRIK BIAK
BARAT KABUPATEN BIAK NUMFOR**

***THE ROLE OF THE KAMPUNG HEAD TO INCREASE COMMUNITY PARTICIPATION
IN POLITICS IN MAMORIBO VILLAGE BIAK BARAT DISTRICT, BIAK NUMFOR
REGENCY***

Yemima Rumbewas

Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik IISIP Yapis Biak

ABSTRAK

Menggunakan hak suara dalam pemilihan umum dapat dianggap sebagai suatu bentuk partisipasi politik yang sangat kecil karena partisipasi tersebut hanya berlaku dan berakhir pada saat pemberian suara telah terlaksana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana politik dapat mempengaruhi peranan pemerintahan kepala kampung, dan untuk mengetahui faktor- faktor apa yang menjadi hambatan kepala kampung dalam meningkatkan partisipasi berpolitik masyarakat di Kampung Mamoribo Kabupaten Biak Numfor. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan kepemimpinan Kepala Kampung Mamoribo cukup memberikan dampak yang positif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi para aparat guna membangun kerja sama di lingkungan kantor Desa dan masyarakat Kampung Mamoribo.

Kata Kunci: Peran Kepala Kampung, Peningkatan Partisipasi, Berpolitik.

ABSTRACT

Using voting rights in general elections can be considered as a very small form of political participation because such participation only takes effect and ends when the voting has taken place. The purpose of this study was to find out how politics can affect the role of the village head's government, and to find out what factors are the obstacles for village heads in increasing community political participation in Mamoribo Village, Biak Numfor Regency. The research method used is a qualitative research method with a qualitative approach. causal associative. While the data analysis technique used is qualitative data analysis techniques. The results showed that the leadership role of the Mamoribo Village Head had quite a positive impact on the implementation of the duties and functions of the officers in order to build cooperation within the village office and the Mamoribo Village community.

Keywords: *The Role of the Village Head, Increased Participation, Politics.*

PENDAHULUAN

Konsep partisipasi memiliki banyak pengertian sehingga mengelompokan bentuk dari partisipasi perlu dilakukan guna

menemukan formula yang tepat. Beberapa konsep partisipasi sering di salahartikan ditengah-tengah masyarakat, oleh sebab itu dalam kaitanya dengan partisipasi politik sangat penting memahami lebih khusus perilaku masyarakat dalam ikut menggunakan hak politik yang dimiliki.

Menggunakan hak suara dalam pemilihan umum dapat dianggap sebagai suatu bentuk partisipasi politik yang sangat kecil karena partisipasi tersebut hanya berlaku dan berakhir pada saat pemberian suara telah terlaksana. Walaupun demikian bentuk partisipasi politik yang sangat kecil ini mampu memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi sistem demokrasi dengan kata lain, apabila partisipasi politik masyarakat sangat tinggi dalam pemilihan maka proses pembangunan akan berjalan searah dengan tuntutan dan keinginan masyarakat namun sebaliknya partisipasi politik tidak akan berarti sama sekali tanpa memenuhi syarat dari segi mutu maupun banyaknya jumlah masyarakat yang berpartisipasi.

Oleh karena itu partisipasi politik masyarakat menjadi elemen yang sangat penting bagi suksesnya pelaksanaan pemilihan umum baik ditingkat Pusat maupun Daerah. Partisipasi masyarakat di daerah Pedesaan sangat berkaitan erat dengan

eksistensi Pemerintahan Desa mengingat Desa yang menjadi sampel penelitian merupakan wilayah Otonomi Khusus (otsus) maka sesuai dengan undang – undang Otsus No. 21 tahun 2001, tanpa mengabaikan prinsip – prinsip hukum formal tentang format Pemerintahan Desa sebagaimana tertuang didalam undang – undang No. 6 tentang Desa dengan kata lain menghargai hak – hak khusus Masyarakat Kampung sesuai tatanan adat – istiadat, sehingga perubahan nomenklatur sebutan Desa menjadi Kampung berlaku di seluruh wilayah Provinsi Papua, sebagai wujud dari amanat UU Otsus tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Termasuk dalam strata pemerintahan yang luas, Pemerintahan Kampung perlu memiliki sistem pemerintahan yang mencerminkan tata nilai yang dianut masyarakat dalam wilayah pemerintahannya dengan dijiwai semangat reformasi, salah satunya reformasi bidang politik. Menarik untuk mencermati visi - misi gubernur provinsi papua yang mengedepankan konsep kepemimpinan 3 (tiga) tungku dengan memberikan pengakuan terhadap eksistensi Kepala Kampung, Kepala Adat dan Pemimpin Agama.

Peranan kepala kampung, selaku penyelenggara pemerintahan di tingkat

masyarakat akar rumput tentu, memiliki tugas yang tidak mudah. Hal tersebut berkaitan dengan pola pengeksekusian kebijakan agar kemudian dapat bermanfaat tanpa campur tangan pihak – pihak luar, dengan kata lain setiap kebijakan yang melibatkan peran kepemimpinan kepala kampung semata - mata hanya untuk kepentingan masyarakat kampung dengan didasari hati nurani bukan karena kepentingan individu maupun golongan.

Adapun dalam kaitannya dengan kepemimpinan kepala kampung tentu banyak mendapat tantangan terutama menyangkut kepentingan kekuasaan atau penguasa yang sedang berkuasa di panggung politik, bahkan sudah menjadi trend topik baik di media sosial, maupun media elektronik lainnya, politik uang menjadi hal yang lumrah di dunia politik. Sejauh pengamatan penulis peran kepemimpinan kepala kampung sering salah di manfaatkan terutama oleh para politicus yang sedang berkuasa bahkan tertarik untuk terus menguasai panggung politik.

Kepala Kampung yang seharusnya menjadi fasilitator pemerintah serta abdi masyarakat secara perlahan di giring untuk terlibat dalam politik praktis oleh karena perannya yang mampu memberikan kontribusi baik dari segi penggalangan

kekuatan massa maupun kapasitasnya sebagai Kepala Kampung yang barangkali terlilit hutang pada saat maju sebagai kepala kampung.

Sedangkan di lain sisi kemiskinan dan keterbelakangan pendidikan menjadi faktor utama yang menghambat laju pembangunan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan sangat minim dirasakan. Hal ini berdampak pada ketergantungan masyarakat terhadap kepemimpinan yang dianggap mampu mendatangkan keuntungan financial bagi masyarakat sehingga berbagai macam cara di halalkan termasuk money politic (politik uang). Pendidikan politik semacam ini tentu berdampak negativ bagi masyarakat luas terutama masyarakat perkampungan yang justru belum dewasa sepenuhnya memahami akibat dari politik uang itu sendiri.

Beberapa peran Kepala Kampung seperti pemberdayaan ekonomi kerakyatan, peningkatan pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, sarana prasarana dan peningkatan mutu pendidikan serta pemanfaatan lembaga - lembaga yang bergerak dibidang permodalan bagi pengusaha kecil dan menengah di perkampungan, belum secara maksimal di manfaatkan guna menjawab tuntutan paradigma pembangunan yang antara lain

adalah mengalokasikan kepentingan rakyat jelata.

Dengan demikian maka sangat penting bagi kepala kampung untuk memahami uraian tugas pokok dan fungsi sehingga mampu berperan secara nyata dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pembangunan politik sehingga mampu melahirkan politik yang bermartabat, secara khusus bagi masyarakat Kampung Mamoribo Distrik Biak Barat.

Menurut pendapat beberapa ahli faktor yang menyebabkan orang mau atau tidak mau ikut berpartisipasi dalam politik antara lain: Kelas yaitu individu - individu dengan status sosial, pendapatan dan pekerjaan yang serupa. Kelompok atau komunal yaitu individu-individu dengan asal- usul ras, agama, bahasa, atau etnis yang serupa. Lingkungan yaitu individu-individu yang jarak tempat tinggalnya berdekatan. Partai yaitu individu-individu yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama dan berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang pemerintahan. Dan Golongan atau faraksi yaitu individu yang dipersatukan oleh interaksi yang terusmenerus antara satu sama lain yang pada akhirnya membentuk hubungan patron-client yang berlaku atas orang-orang dengan tingkat

status sosial, pendidikan dan ekonomi yang tidak sederajat. (Huntington & Nelson, 1994).

Sedangkan Hermawan berpendapat bahwa yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik adalah: Lingkungan sosial politik tidak langsung seperti sistem politik, media masa, sistem budaya, dan lain-lain. Lingkungan politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor seperti keluarga, teman, agama, kelas, dan sebagainya. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Faktor sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan politik, seperti suasana kelompok, ancaman, dan lain-lain, (Hermawan,2001).

adapun menurut Mas'ood dan MacAndrews (2000:225) partisipasi politik masyarakat secara umum dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk sebagai berikut: Electroral activity, yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pemilihan. Termasuk dalam kategori ini adalah ikut serta dalam memberikan sumbangan untuk kampanye, menjadi sukarelawan dalam kegiatan kampanye, ikut mengambil bagian dalam kampanye atau rally politik sebuah

partai, mengajak seseorang untuk mendukung dan memilih sebuah partai atau calon pemimpin, memberikan suara dalam pemilihan, mengawasi pemberian dan penghitungan suara, menilai calon-calon yang diajukan dan lain-lainnya. Lobbying, yaitu tindakan dari seseorang atau sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik dengan tujuan untuk mempengaruhinya menyangkut masalah tertentu.

Adapun Organizational activity, yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalam organisasi sosial dan politik, apakah ia sebagai pemimpin, aktivis, atau sebagai anggota biasa. Contacting, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan secara langsung pejabat pemerintah atau tokoh politik, baik dilakukan secara individu maupun kelompok orang yang kecil jumlahnya. Biasanya, dengan bentuk partisipasi seperti ini akan mendatangkan manfaat bagi orang yang melakukannya. Violence, yaitu dengan cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah, pengacauan dan pengrusakan

METODE PENELITIAN

Penelitian di lakukan pada Kampung Mamoribo Distrik Biak Barat. Metode

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif menggunakan pendekatan asosiatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dengan model interaktif menurut Miles dan Haberman (1992:16) yaitu reduksi data, penyajian data dan penerikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Kepala Kampung Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kampung Mamoribo

Peran Kepala Kampung merupakan bentuk tindakan seseorang dalam kapasitasnya sebagai kepala kampung guna mengimplementasikan program-program pemerintah secara terstruktur maupun secara spontan terhadap masyarakat. dengan kata lain, seorang kepala kampung mampu berperang aktif serta bertanggung jawab penuh guna kesinambungan program pembangunan, sehingga nantinya masyarakat selaku objek dari pembangunan dapat merasakan langsung dampak dari peran kepala kampung.

Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian agar peran kepala kampung

memiliki fungsi di tengah masyarakat, diantaranya disegani karena keberpihakannya kepada masyarakat, memiliki konsep atau program yang menyentuh dan mampu membawahkan perubahan, bertanggung jawab kepada pemerintah dan masyarakat, menjadi teladan yang patut ditiru, tampil berwibawa dan bersahaja, berpikir kreatif dan inovatif

Beberapa hal tersebut diatas di harapkan dapat memberikan gambaran positif bagi kepala kampung dalam mengaplikasikan peranannya di tengah-tengah masyarakat.

Mempengaruhi

Masyarakat memiliki karakter yang berbeda-beda sehingga perlu keahlian untuk mengarahkan dan mengendalikan pola pikir masyarakat. Kepala kampung di harapkan mampu berperan bukan saja dalam urusan pemerintahan tetapi juga mampu mempengaruhi masyarakat sehingga timbul pemahaman di tengah masyarakat tentang arti penting diarahkan untuk mencapai tujuan bersama.

Menjadi Contoh Yang Baik

Selain membangun kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan kepala kampung, menjadi contoh yang baik bagi masyarakat mampu meningkatkan peranserta masyarakat dalam berpolitik seefektif mungkin, diharapkan ketika seorang

pemimpin menjadi contoh baik bagi rakyatnya, maka masyarakat akan lebih antusias dalam mengikuti intruksi dan ajakan dari pemerintah termasuk dalam melaksanakan setiap program kerja seorang pemimpin yang memang memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri.

Memotivasi

Selain beberapa hal diatas kepala kampung perlu juga diharapkan mampu menjadi motivator bagi masyarakat agar melibatkan diri bukan saja dalam kegiatan yang bersifat resmi dalam pemerintahan tetapi mampu memotivasi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pembinaan mental guna pembangunan karakter masyarakat dari segi rohani sehingga tumbuh generasi yang bekerja secara jujur adil dan beriman.

Berpihak Kepada Masyarakat

Dalam pembangunan dewasa ini masyarakat selaku kaum jelata sangat membutuhkan perlindungan baik itu dari sisi hukum dan perlakuan yang adil dengan berbagai ancaman, intimidasi yang datang dari dalam maupun luar wilayah sebuah pemerintahan.

Tanggung Jawab

Sadar benar akan tanggung jawab yang diberikan oleh Negara dan Pemerintah dalam menjangankan tugas yang di emban tentu tidak

terlepas dari sumpah dan janji jabatan yang telah diucapkan pada saat dia di lantik.

Faktor-Faktor Penghambat Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat.

Partisipasi atau peranserta masyarakat dalam turut merencanakan dan memberikan saran pendapat sangat berkaitan erat dengan keberhasilan kepemimpinan pada level tertentu. Seorang pemimpin haruslah menjadi contoh sehingga mampu merangsang segenap elemen masyarakat yang berdomisili di daerah pemerintahannya agar turut mengambil bagian dalam merencanakan dan menyukseskan program kerja pemerintah.

Kepala kampung mamoribo dalam kapasitasnya di tingkat kampung sangat berperan dalam menentukan arah kebijakan dan pelayanan pemerintahan yang adil, merata serta menyentu lansung dengan mengikut sertakan masyarakat di kampung mamoribo dalam pengambilan keputusan.

Faktor yang dapat menghambat meningkatnya partisipasi politik masyarakat di kampung mamoribo yaitu:

Pendidikan

Pengertian pendidikan menjadi hal yang sebaiknya kita juga perlu ketahui untuk menambah wawasan kita terhadap hal yang selalu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, karena kita selalu melewati proses

pendidikan maka oleh sebab itulah kita sebagai pelaku harus paham juga apa pengertian pendidikan itu sendiri. Masyarakat perlu dibekali dengan ilmu yang berkaitan dengan peranserta daalam pembangunan, pelatihan, kursus dan diklat perlu terus dilakukan agar lelim menumbuh kembangkan daya pikir dan daya dukung masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah ditingkat kampung.

Budaya

Budaya merupakan cara hidup yang berkembang, serta dimiliki bersama oleh kelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya ini terbentuk dari berbagai unsur yang rumit, termasuk sitem agama dan politik, adat istiadat, perkakas, bahasa, bangunan, pakaian, serta karya seni.

Ekonomi

Ketergantungan akan Sumber Daya Alam sudah menjadi rutinitas masyarakat kampung dalam menopang ekonomi keluarga terutama mereka yang bekerja sebagai petani dan nelayan. Sehingga aktivitas untuk memikirkan dan terlibat langsung dalam dunia pemerintahan dan politik jarang ditekuni akibat dari keterbatasan waktu yang dimiliki.

Upaya-upaya yang di lakukan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kampung Mamoribo

Pengakuan terhadap hak – hak adat masyarakat kampung.

Menempatkan harkat dan martabat masyarakat kampung menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses berpolitik di tanah air oleh sebab itu dalam sistem demokratisasi sangat penting untuk menjadi bagian yang memperjuangkan hak - hak lokal dalam konteks kemasyarakatan, sehingga kelanjutan dari proses pembangunan berpolitik terus mendapat pengakuan secara berkesinambungan di sela sendih kehidupan masyarakat adat.

Pendidikan Politik yang baik.

Pelatihan serta peningkatan mutu berpolitik ditengah masyarakat merupakan bagian yang harus di galakan guna memberikan pemahaman tentang nilai nilai berpolitik secara praktis dan sederhana.

Membudayakan politik

Dengan menempatkan budaya sebagai bagian yang sangat di sakralkan berarti menyelaraskan nilai nilai berpolitik sesuai dengan sistem demokratisasi yang bertujuan membangun karakter masyarakat yang mampu menjawab tantangan fenomena berpolitik, seiring perkembangan zaman.

Perencanaan pusat Ekonomi kreatif kemasyarakatan

Program pemberdayaan masyarakat kampung merupakan konsep yang patut di berikan apresiasi dengan terus berupayah meletakkan dasar- dasar kemandirian terhadap masyarakat yang tentu mendambahkan perubahan baik secara mental maupun material.

SIMPULAN

Setelah penulis membahas hasil penelitian di atas maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelayanan dan peranan kepemimpinan yang baik di Kampung Mamoribo belum maksimal sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat Kampung Mamoribo.
2. Peranan kepemimpinan Kepala Kampung Mamoribo cukup memberikan dampak yang positif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi para aparat guna membangun kerja sama di lingkungan kantor Desa dan masyarakat Kampung Mamoribo.
3. Mengarahkan dan memfasilitasi aspirasi masyarakat Kampung Mamoribo merupakan sesuatu yang perlu di kedepankan lagi guna persamaan persepsi demi terwujudnya pembangunan di tingkat kampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond G, Dalton, R, Powell, Stromp K. 2009. *Comparative Politics Today: A World View*, 9th edn. New York: Person Longman. Taliziduhu,
- Amstrong, M dan Baron, A. (1998). *Performance Mngagement – The New Realities*. Institute of Personel and Development, London.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Ch Cangara, Hafied. 2009. *Komunikasi Politik Konsep Teori Dan Strategi* Jakarta.
- Coplin, William dan Marsedes Marbun. 2003 *Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis*. Bandung : Sinar Baru Algensindo
- Dalton, R, Almond G, Powell, Stromp K. 2009. *Comparative Politics Today: A World View*, 9th edn. New York: Person Longman.
- Freire, Paulo. 2007. *Politik Pendidikan Kebudayaan, Kekuasaan Dan Pembebasan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Gaffar, Afan. 2006. *Politik Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Hamidi, Jazim & Lutfi, Mustafa. 2010. *Civic Education Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*. Jakarta. PT. Gramedia
- Harrison, Lisa. 2007. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Huntington, Samuel. 2003. *Tata tertib politik Ditengah Pergeseran Kepentingan Massa*. Jakarta. Rajagrafindo Persada
- Kantaprawira, R. 2004. *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Mas'ood & MacAndrews. 2003. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Nazsir. Nasrullah dan Amril Ghaffar Sunny. 2004. *Partai Politik, Partisipasi Politik dan Pendidikan Politik*. Bandung: PPS FISIP UNPAD Press.
- Rahman.H.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rajagrafindo olisin, dkk. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY
- Sumbu, Sell dan dkk. 2010. *Kamus Umum Politik dan Hukum*. Jakarta; Jala Permata Aksara.